

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK
MEWUJUDKAN KARAKTER JUPE MANDI TANGSE KEBEDIL
(SURVEY DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SMA NEGERI 3 BANTUL PADA
TAHUN PELAJARAN 2012/2013)

ABSTRAK

Oleh : Sumaryati

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan melahirkan generasi yang cerdas secara utuh, cerdas intelektual, cerdas, emosi, dan cerdas spiritualnya. Dalam kaitan dengan hal tersebut maka pendidikan nilai, khususnya pendidikan karakter perlu dibangun kembali. Hal ini untuk mengantisipasi dan memberikan jawaban, akan terjadinya degradasi moral di dalam tubuh bangsa Indonesia. Memudarnya rasa kemanusiaan, memudarnya rasa malu, menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan amoral, antara lain korupsi. Saatnya dunia pendidikan memberikan andil untuk menepis terjadinya fenomena tersebut, dengan membina lahirnya mental-mental yang kuat, tangguh, dalam melawan keinginan untuk korupsi, yaitu mental antikorupsi. Disinilah urgensi pendidikan anti korupsi diteliti di SMA Negeri 3 Bantul, karena SMA ini adalah SMA yang mengedepankan karakter . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pendidikan antikorupsi untuk mewujudkan karakter jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, dan berani dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian dengan penjelasan-penjelasan yang rasional objektif. Subjek penelitian ini adalah guru SMA Negeri 3 Bantul , Yogyakarta. Objek penelitian adalah implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi untuk mewujudkan karakter jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil dalam proses pembelajaran. Metode pengumpulan data dengan observasi partisipasi, dan dokumentasi . Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, dengan langkah reduksi data, klasifikasi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 3 Bantul terintegrasi dalam mata pelajaran. Guru di SMA Negeri 3 Bantul telah mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajarannya, dengan cara mencantumkan nilai-nilai yang akan dikembangkan dan diwujudkan dalam proses pembelajaran di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru SMA Negeri 3 Bantul dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai adalah *student centered* (walaupun belum optimal). Metode guru SMA Negeri 3 Bantul dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran adalah diskusi kelas, diskusi kelompok, praktik lapangan, dan presentasi, sehingga belum variatif dan kreatif. Evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 3 Bantul adalah pemberian tugas dan presentasi setiap tugas yang diberikan guru. Evaluasi yang berupa catatan anekdot, belum secara sepenuhnya dilakukan oleh guru. Mata pelajaran Olah raga merupakan mata pelajaran yang lebih memungkinkan diimplementasikannya nilai-nilai pendidikan antikorupsi secara menarik, kreatif, dan nyaman, selain mata pelajaran PPKn yang secara normatif bertugas untuk mengimplementasikan dan mengembangkan karakter bangsa.

Key words : nilai-nilai pendidikan antikorupsi, student centered, diskusi kelas, catatan anekdot

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan yang secara substansial dan mendasar sama, yaitu ingin melindungi dan mensejahterakan semua warganya. Perbedaannya ditentukan oleh sistem kenegaraan yang dipakai, cara atau metode mencapai tujuan, ketersediaan sarana prasarana, dan juga pada semangat para penyelenggara negara dan masyarakatnya. Negara Indonesia juga memiliki cita-cita yang sangat luhur, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang meliputi, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Tujuan yang masih umum tersebut, selanjutnya diperjelas dalam pasal-pasal UUD 1945. Tujuan yang satu dengan tujuan lainnya tentu saja saling terkait, tujuan yang satu menjadi pra syarat bagi terwujudnya tujuan lainnya. Sebagai wujud nyata bahwa Negara mampu melindungi warganya adalah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dan mencerdaskan rakyatnya, setelah rakyat cerdas maka kesejahteraan akan dapat dicapai juga. Karena itu upaya paling mendasar Negara untuk mampu mewujudkan tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan rakyatnya dengan memperbaiki manajemen pendidikan nasional .

Tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Pasal 1 Undang_undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Potensi yang diinginkan ada pada peserta didik meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik.. Aspek kognitif,, yaitu peserta didik mampu menguasai ilmu yang dipelajarinya secara optimal, aspek afektif yaitu peserta didik mampu bersikap,bertingkah laku secara tepat sesuai dengan tempat, waktu,dan kepentingan. Sedangkan aspek psikomotorik peserta didik diharapkan mampu mengembangkan dirinya sendiri dalam bersikap dan menghadapi masalah. Ketiga potensi peserta didik tersebut idealnya dapat tercapai secara seimbang, sehingga terlahir generasi yang normal. Namun jika diperhatikan , maka secara umum pendidikan yang dilakukan di Indonesai masih sangat didominasi oleh ilmu atau pengetahuan yang mengarah pada ketercapaian aspek kognitif saja . Sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotorik sering terabaikan. Menurut Ali Ibrahim Akbar, praktik pendidikan di Indonesia cenderung beorientasi pada pendidikan *hard skill* (ketrampilan teknis) yang lebih bersifat mengembangkan kecerdasan intelektual (IQ), sedangkan kemampuan *soft skill* yang tertuang dalam kecerdasan emosi

dan kecerdasan spiritual, sangat kurang. Pembelajaran di berbagai sekolah bahkan perguruan tinggi, lebih menekankan perolehan nilai ulangan maupun ujian. Banyak guru yang berpandangan bahwa peserta didik dinyatakan baik kompetensinya, apabila nilai hasil ulangan atau ujiannya tinggi. Hal ini juga didukung dengan muatan kurikulum yang diberlakukan dalam sistem pendidikan nasional kita, muatan materi untuk kecerdasan intelektual dapat dikatakan memiliki prioritas yang tinggi, hampir 85 % dari total sks yang harus ditempuh peserta didik, sedangkan untuk kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, atau aspek pengembangan kepribadian hanya berkisar 10 – 15 % dari total sks yang ditempuh. Bukti selanjutnya terkait dengan sistem penilaian atau evaluasi oleh guru atau dosen. Sistem evaluasi oleh guru masih sangat cenderung ke aspek intelektual, belum mengarah ke aspek emosi dan spiritual, hal ini didukung dengan instrument penilaian. Akhirnya terjadilah fakta demoralisasi di semua lini masyarakat. Sekolah dinilai belum optimal dalam menumbuhkan dan mengembangkan karakter peserta didik. Sekolah lebih cenderung mengejar target-target akademis . Hal ini membuat kreativitas, keberanian menghadapi resiko, kemandirian dan ketahanan menghadapi masalah hidup menjadi rendah, anak mudah frustrasi, menyerah, dan kehilangan semangat juang.

Seiring dengan hal di atas, pendidikan yang cenderung lebih mengarah kepada *hard skill* dan menghasilkan lulusan yang berprestasi dalam bidang akademik saja harus mulai dibenahi. Pembelajaran yang dikembangkan sekarang, dalam kurikulum yang selalu direvisi sampai kurikulum terbaru yang berlaku, pembelajaran juga harus berbasis pada pengembangan *soft skill* (interaksi sosial). Hal ini sangat penting dalam pembentukan karakter anak bangsa yang mampu bersaing dan beretika . Pendidikan *soft skill* berorientasi pada pembinaan mentalitas , agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan. Penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh *hard skill*, namun juga sangat ditentukan oleh ketrampilan mengelola diri dan orang lain. Oleh karena itu pendidikan karakter harus disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diintensifkan sejak dini di semua level kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga pendidikan harus tampil menjadi pionir pendidikan karakter . Hal ini disebabkan oleh peran strategis pendidikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melahirkan dan mempersiapkan kader masa depan yang berkualitas di bidang ilmu, moral, Lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan keluarga, masyarakat, dan elemen bangsa lain untuk mewujudkan agenda besar menanamkan karakter kuat kepada peserta didik .

Dengan habituasi karakter yang baik dan kuat, maka akan melahirkan pemimpin bangsa yang bertanggungjawab. Pemimpin bangsa yang tidak sekalipun berniat untuk mengambil hal yang bukan menjadi haknya. Habituasi tersebut membutuhkan waktu dan proses secara terus menerus. Terkait dengan terjadinya demoralisasi para pemimpin yang sangat akut, yaitu meraja lelaya korupsi oleh para pemimpin bangsa, maka perlu dilakukan upaya untuk menghabituisasi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda untuk berperilaku jujur, disiplin, kerja keras, tanggungjawab. Upaya tersebut antara lain pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan anti korupsi, sebagai salah satu jenis baru pendidikan karakter bangsa. Karakter anti korupsi yang ditanamkan, ditumbuhkan, dikembangkan, dan dibiasakan dalam kebijakan pendidikan anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, tanggungjawab, sederhana, kerja keras, disiplin, berani dan adil.

Satuan pendidikan dengan tugas utama mendidik peserta didik menjadi manusia yang cerdas baik secara intelektual, mental, maupun spiritual, dalam realitasnya belum sepenuhnya mampu mewujudkan tugasnya tersebut. Ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, pemalas, belum dapat menentukan diri sendiri, mudah putus asa, bergaya hidup mewah / perilaku konsumtif, penakut, masa bodoh, pengumpulan tugas tidak tepat waktu, dan masih suka pilih kasih, masih sering terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah. Pihak sekolah, yang seharusnya memberi teladan justru kurang memberikan keteladanan, justru menciptakan mekanisme yang curang, tidak jujur demi tercapainya kognitif siswa semata, misalnya kebocoran soal ujian, membiarkan siswa saling bekerjasama pada saat ujian. Ketidakdisiplinan juga sering terjadi pada tenaga pendidiknya / guru, misalnya terlambat hadir di sekolah, masuk dan keluar ruang kelas tidak sesuai waktu yang ditentukan. Belum tercapainya tujuan pendidikan tersebut antara lain disebabkan oleh belum adanya kesamaan visi semua komponen sekolah, keterbatasan sarana prasarana, belum bakunya dan lengkapnya sistem evaluasi, dalam membiasakan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian tentang strategi / cara implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan karakter untuk peserta didik oleh satuan pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran perlu dilakukan. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran oleh peneliti diasumsikan lebih penting, dibandingkan dengan implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam manajemen sekolah dan ekstrakurikuler. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran dilaksanakan oleh semua guru secara berkelanjutan, dengan langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang lebih jelas. Sedangkan manajemen sekolah dan ekstrakurikuler, hanya dilakukan oleh

sebagian guru atau anggota sekolah, dengan proses dan evaluasi yang belum baku. SMA Negeri 3 Bantul merupakan salah satu sekolah yang berkomitmen kuat dalam pendidikan karakter siswanya, hal tersebut didukung dengan berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain pelaksanaan konseling efektif, pemberian tugas, guru harus mencantumkan karakter yang akan dicapai dalam pembelajaran di setiap RPP nya, pengembangan ekstrakurikuler sekolah, dan kegiatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penting kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran sebagai media mengembangkan karakter jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, keberanian, dan adil peserta didik di SMA Negeri 3 Bantul, Yogyakarta.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

a. Pendidikan karakter bangsa di sekolah

Karakter yang kuat akan membentuk mental yang kuat. Mental yang kuat akan melahirkan semangat yang kuat, pantang menyerah, kerja keras, sehingga akan mendapatkan kesempatan dan menjadi pemenang. Demikian juga dengan bangsa Indonesia, harus memiliki mental kuat, agar bangsa Indonesia mampu menjadi pemenang di antara bangsa-bangsa di dunia. Jika karakter bangsa lemah maka akan menjadi objek dan bulan-bulanan oleh Negara yang menguasai ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu pendidikan karakter merupakan hal yang seharusnya bagi bangsa Indonesia untuk membangun mental pemenang bagi generasi muda.

Menurut Jamal Maruf Asmani (2012; 42), tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah, untuk mengarahkan pada tercapainya pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, seimbang sesuai dengan standard kompetensi lulusan. Para peserta didik diharapkan dapat meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji, , menginternalisasikan, serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia , sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Sedangkan pendidikan karakter pada tingkatan institusi, mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan symbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga

sekolah dan masyarakat sekitar. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter dan cita sekolah tersebut di mata masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, pendidikan karakter yang dijalankan di sekolah, mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam mencapai prestasi akademik di sekolahnya. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang menghambat keberhasilan akademiknya. Joseph Zins, dan kawan-kawannya seperti ditulis dalam bukunya Jamal Maruf Asmani (2012; 44) menyatakan berdasarkan kompilasi berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah, dinyatakan bahwa faktor-faktor kegagalan anak di sekolah bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Sedangkan Daniel Goleman menyatakan keberhasilan masyarakat 80 % dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20 % ditentukan oleh kecerdasan otak. Anak-anak dengan masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan jika tidak ditangani akan terbawa sampai dewasa nanti. Sebaliknya remaja dengan karakter kuat akan terhindar dari masalah-masalah umum yang terjadi pada remaja, misal kenakalan, tawuran, narkoba, dan lainnya.

Agar pendidikan karakter dapat dijalankan secara lebih jelas dan terarah, maka ditentukanlah pilar-pilar dalam pendidikan karakter. Menurut Jamal Maruf Asmani (2012: 50) dalam pendidikan karakter terdapat Sembilan pilar yang saling berkaitan, yaitu tanggungjawab (*responsibility*), rasa hormat (*respect*), keadilan (*fairness*), keberanian (*Courage*), kejujuran (*honesty*), kewarganegaraan (*citizenship*), disiplin diri (*self-discipline*), peduli (*caring*) dan ketekunan (*perseverance*). Pendidikan karakter memang harus diterapkan secara nyata, mulai di rumah, di lembaga pendidikan sekolah, dan di dalam kehidupan masyarakat, bahkan termasuk dalam dunia usaha dan industri.

Semua pilar karakter tersebut harus dikembangkan di Negara kita secara holistik melalui pendidikan nasional. Namun demikian akan ditetapkan pilar-pilar tertentu yang perlu mendapatkan penekanan, sesuai dengan permasalahan bangsa yang dihadapi. Contoh, karakter kejujuran mendapatkan penekanan karena di Negara kita masih banyak kasus korupsi, nepotisme, demikian juga dengan pilar

keadilan, karena di dalam masyarakat masih ditemukan banyak ketidakadilan. Keberhasilan program pendidikan karakter di sekolah adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. Indikator ini dapat menjadi parameter sukses atau tidaknya lembaga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan karakter .

Ketercapaian tujuan pendidikan karakter salah satunya sangat ditentukan oleh peran guru. Adapaun peran utama guru dalam pendidikan karakter adalah :

- 1) Keteladanan , keteladanan guru sangat penting demi efektivitas pendidikan karakter. Tanpa keteladanan , pendidikan karakter akan kehilangan ruhnya, sehingga hanya menjadi slogan, kamufase, ataupun fatamorgana .
- 2) Inspirator, guru harus mampu membangkitkan semangat untuk maju, dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya.
- 3) Motivator, guru memiliki kemampuan dalam membangkitkan spirit, etos kerja, dan potensi dalam diri peserta didik. Cara yang ditempuh misalnya dengan mengadakan kompetisi / lomba, pentas seni, cerita biografi orang sukses, mengadakan berbagai program yang bersifat praktis.
- 4) Dinamisator , seorang guru tidak hanya mampu membangkitkan semangat, tetapi juga menjadi lokomotif yang benar-benar mendorong ketercapaian tujuan dengan kecepatan, kecerdasan, dan kearifan.
- 5) Evaluator, dalam evaluasi dibutuhkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga kritik yang membangun akan terjadi. Dengan demikian dalam proses ini tidak boleh saling menyalahkan, balas dendam, atau sikap negatif lainnya.

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah tidak dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran tersendiri. Kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ini, selanjutnya diinternalisasikan dalam beberapa aspek penting di sekolah.

- 1) Pendidikan karakter diinternalisasikan dalam pembelajaran

Kegiatan pembelajaran bertujuan menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan dan menjadikan peserta didik mengenal, menyadari atau peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam perilaku. Secara substansif pendidikan karakter di sekolah terkait langsung dengan mata pelajaran pendidikan agama dan Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan. Internalisasi pendidikan karakter dalam mata pelajaran

mengarah pada internalisasi nilai-nilai dalam tingkah laku sehari-hari melalui proses pembelajaran sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

2) Pendidikan karakter diinternalisasikan dalam manajemen sekolah

Manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dalam upaya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi-misi, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Unsur-unsur pendidikan karakter yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan meliputi nilai-nilai karakter kompetensi lulusan, muatan kurikulum nilai-nilai karakter, nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, nilai-nilai karakter pendidik dan tenaga kependidikan, serta nilai-nilai karakter pembinaan peserta didik. Manajemen yang diterapkan dalam pendidikan karakter harus bersifat partisipatif, demokratis, elaborative, dan eksploratif.

3) Pendidikan karakter diinternalisasikan dalam ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan konseling, untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus dilaksanakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah. Visi ekstrakurikuler adalah berkembangnya minat, bakat, potensi, menumbuhkan kemandirian, kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan ekstrakurikuler belum diakui sebagai komponen pendidikan yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ekstrakurikuler baru dianggap sebagai pelengkap kegiatan intrakurikuler. Pelaksanaan ekstrakurikuler yang didesain secara profesional mampu menjadi wahana efektif bagi lahir dan berkembangnya bakat anak, membentuk karakter pemenang, mandiri pada diri anak. Oleh sebab itu ekstrakurikuler harus didesain secara menarik, kreatif, menyenangkan dan mudah.

Agar tujuan pendidikan karakter sampai tujuannya, maka langkah-langkah pendidikan karakter sangat perlu diperhatikan. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja, namun harus dilakukan sesuai dengan pengetahuannya, dan selanjutnya melakukan secara terus menerus sampai menjadi kebiasaan. Terlebih karakter yang menjangkau emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian dalam pendidikan karakter dibutuhkan *moral knowing* (pengetahuan tentang

moral), *moral feeling* (penguatan emosi tentang moral), dan *moral action* (perbuatan bermoral). Dimensi yang termasuk dalam *moral knowing* untuk mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral, penentuan sudut pandang, logika moral, keberanian dalam mengambil sikap, dan pengenalan diri. Adapun dimensi *moral feeling* adalah kesadaran terhadap jati diri, percaya diri,, kepekaan terhadap penderitaan orang lain, cinta kepada kebenaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Dimensi *moral acting* meliputi kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Berdasarkan penjelasan tersebut karakter dikembangkan melalui tiga langkah, yaitu mengembangkan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Hal ini senada dengan pendapat dari Ki Hadjar Dewantara, yang mengutamakan pengembangan cipta, rasa, dan karsa. Tahap-tahap pendidikan karakter tersebut harus dilakukan secara sistematis, tidak boleh meloncat, karena akan sangat mempengaruhi hasilnya.

2. Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Salah satu persoalan dalam pendidikan karakter bangsa yang sangat mendasar dan membudaya adalah persoalan korupsi. Berkaitan dengan kenyataan masih terjadinya korupsi di beberapa aspek bidang kehidupan kenegaraan maupun bermasyarakat, maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi atau paling tidak mengurangi terjadinya korupsi oleh semua pihak. Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia dipakai kata resuah, dari bahasa Arab “*risywah*” yang artinya korupsi. Secara terminologis risywah (suap) berarti pemberian yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan , atau untuk memperoleh kedudukan . Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan keputusan hukum, perbuatan ini termasuk dosa.

Korupsi menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Pendidikan Tinggi, berasal dari kata korup yang berarti busuk, suka menerima suap / sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Pelakunya disebut koruptor, yaitu orang yang melakukan korupsi. Menurut Subekti dan Tjitrosudibjo, *corruptive* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Sedangkan Baharudin Loppa, mengutip pendapat David M. Chalmes, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang

menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang korupsi tersebut, dapat dinyatakan bahwa korupsi sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut factor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Dalam kenyataannya, korupsi memiliki beberapa bentuk, yaitu kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Upaya penanggulangan korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur jalur penal dan non-penal. Jalur penal meliputi kebijakan penerapan hukum pidana, sifat represif, apabila sudah terjadi korupsi. Sedangkan jalur non-penal , meliputi kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui masmedia, penyuluhan, dan atau pendidikan dan upaya preventif .

Pendidikan merupakan media dalam melahirkan generasi yang utuh, yaitu generasi yang antara sikap dan pemikiran tidak terpisahkan. Dengan demikian pendidikan harus diarahkan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tiak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang harus diupayakan terwujud dalam kehidupan sehari-hari sebagai *habit* tersebut antara lain nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi, yaitu nilai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil.

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dengan demikian pendidikan anti korupsi tidak sekedar menekankan pada aspek *kognitif* atau pengetahuan semata, namun juga menekankan pada pembentukan karakter (*afektif*), dan kesadaran moral dalam melawan perilaku korupsi. Menurut Muhammad Nuh dalam bukunya Agus Wibowo (2013 : 38) pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Hal ini senada dengan pendapat Haryono Umar yang disetir juga oleh Agus Wibowo (2013: 38), yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Mental

antikorupsi harus diterapkan sejak dini, selanjutnya dalam beberapa tahun ke depan akan tumbuh generasi-generasi yang anti korupsi. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengajaran pendidikan antikorupsi lebih tepat menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis, diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis, dan berani berpendapat.

Menurut Biyanto, dalam bukunya Agus Wibowo (2013:41), terdapat beberapa alasan pentingnya pendidikan anti korupsi di sekolah. Alasan tersebut adalah dunia pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahahaman dan upaya pemberantasan korupsi, lembaga pendidikan memiliki jaringan yang kuat di seluruh tanah air, sehingga pendidikan anti korupsi dapat bersifat masif, dan pelaku korupsi pada umumnya adalah orang pintar, sehingga lembaga pendidikan bertugas tidak hanya melahirkan orang pintar tapi sekaligus orang yang berhati mulia.

Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan atau sekolah ini, selanjutnya berkonsekuensi pada adanya upaya menemukan strategi yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan. Dikarenakan sudah sangat banyaknya mata pelajaran atau mata kuliah, maka strategi yang paling mungkin dipertimbangkan adalah cara *inserting* / penyisipan materi anti korupsi pada semua mata pelajaran.

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang disetir oleh Agus Wahyudi (2013: 45-46) ,nilai-nilai anti korupsi adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Pengertian nilai-nilai tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

No	Nilai	Deskripsi
1	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
2	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
3	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

4	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5	Tanggungjawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara, dan Tuhan yang Maha Esa
6	Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
7	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik , lugas, apa adanya, hemat sesuai kebutuhan, dan rendah hati
8	Keberanian	Mempunyai sifat yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb (tidak takut, gentar), dan pantang mundur
9	Keadilan	Sama rata, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, berpihak pada kebenaran,, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, netral, objektif, dan proporsional.

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pendidikan karakter , yang bertujuan untuk memperbaiki karakter bangsa dengan titik tekan agar generasi muda tidak melakukan dan berkata “tidak” untuk korupsi. Terdapat beberapa yang perlu diperhatikan sekolah dan menginternalisasikan nilai-nilai PAK, di antaranya guru harus merubah paradigma dalam pembelajaran, seperti dapat dilihat pada tabel berikut

No	Pengajaran (teaching)	Pembelajaran (learning)
1	Berpusat pada guru	Berpusat pada siswa

2	Suasana “tertib”, tenang, kaku, membosankan	Suasana “hidup”, menyenangkan dan interaktif
3	Guru dominan dalam aktor kelas	Guru sebagai fasilitator
4	Siswa terlihat dalam kompetisi dengan siswa lain dengan motivasi mengalahkan teman	Siswa diorong bekerja sama dalam mencapai tujuan , tolong menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran
5	Siswa adalah tempat guru mencurahkan pengetahuan (banking system). Prestasinya adalah sejumlah hafalan / reproduksi/ pengetahuan	Siswa adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan
6	Evaluasi oleh guru bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hafalan	Evaluasi oleh siswa berupa refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi
7	Sumber belajar guru dan teks buku	Sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan temannya memecahkan masalah
8	Tempat belajar sebatas ruang kelas	Tempat belajar tidak terbatas pada ruang kelas tetapi seluas jagad raya

Tujuan pendidikan anti korupsi adalah siswa dapat mengenali dan memahami korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, dan mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi dengan demikian tidak hanya berhenti dalam tataran kognitif, namun sampai pada tataran afektif dan psikomotorik. Agar tujuan tersebut tercapai maka pendidikan anti korupsi harus menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, seperti diskusi kelas, studi kasus, kuliah umum, analisis film / kejadian, skenario perbaikan sistem, eksplorasi tematik, pembuatan prototype , evaluasi kebijakan pemerintah, pembuatan alat pendidikan, dan laporan investigasi. Dengan demikian soal evaluasi juga dihindarkan soal yang bersifat hafalan, soal lebih menggali opini dan sikap anti korupsi, dengan bentuk ujian debat, take home

exam, penugasan ke lapangan, dan bentuk lain yang bersifat pengembangan wawasan. Penilaian hasil belajar pendidikan anti korupsi dilakukan secara terus menerus, setiap guru ada di kelas atau di sekolah, dengan menggunakan indikator dari nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi. Model *anecdotal record* (catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan, selalu dapat digunakan guru. Berdasarkan pengamatan, catatan anekdot, tugas, laporan, guru selanjutnya memberikan pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator. Pertimbangan dinyatakan dalam pernyataan kualitatif, sebagai contoh ; BT = belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator), MT = mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator, tapi belum konsisten), MB = mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten), MK = membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten). Pernyataan kualitatif ini digunakan guru ketika melakukan asesmen pada setiap kegiatan belajar, sehingga guru memperoleh profil peserta didik dalam satu semester tentang nilai terkait (jujur, peduli, tanggung jawab, mandiri, sederhana, berani, adil). Dalam prosesnya, dari semester ke semester nilai setiap peserta didik dapat berubah kategorinya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif , yang akan memaparkan atau mendeskripsikan implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan karakter jupe mandi tangse kebedil di SMA Negeri 3 Bantul . Subjek penelitian dalam penelitian ini guru mata pelajaran di SMA Negeri 3 Bantul.. Mata pelajaran secara keseluruhan ada 20 , dan secara acak diambil 8 mata pelajaran , yaitu mata pelajaran matematika, biologi, PPKn, bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris, olah raga, dan sejarah,. Objek penelitian ini adalah implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran sebagai upaya mewujudkan karakter jupe mandi tangse kebedil di SMA Negeri 3 Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dan dokumentasi . Observasi dilakukan oleh peneliti kepada guru yang sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas maupun di lapangan. Observasi dilaksanakan untuk memperoleh data otentik tentang bagaimana guru mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam

proses pembelajarn untuk mewujudkan karakter jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, adil. Observasi untuk setiap guru dilakukan sebanyak dua kali, dalam kelas dan materi yang berbeda. Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan proses pembelajaran yang dilakukan guru, digunakan sebagai media kontrol data dari observasi yang telah dilakukan Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, dengan langkah reduksi data, klasifikasi data, display data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian implementasi pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan karakter jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil di SMA Negeri 3 Bantul, akan disajikan dalam tabel berikut :

No	Mata Pelajaran	RPP	Pendekatan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Evaluasi
1	Biologi	Mencantumkan nilai kejujuran, kerja sama, tanggung jawab, dan disiplin	<i>Student center</i>	Diskusi kelompok	Presentasi, pengamatan sikap
2	Sejarah	Mencantumkan nilai tanggungjawab, kerja sama, kerja keras	<i>Student center</i>	Diskusi kelas	Presentasi makalah
3	Olah Raga	Mencantumkan nilai kerja keras, kerja sama, jujur, adil, berani, tenggang rasa, tanggung jawab, ingin tahu., disiplin	<i>Student center</i>	Praktik lapangan	Sikap, praktik
4	PPKn	Mencantumkan nilai kerja sama, jujur, tanggung jawab, keberanian	<i>Student center</i>	Diskusi kelompok, diskusi kelas	Presentasi, portofolio
5	Bhs	Mencantumkan nilai	Cenderung	Ceramah,	Saat

No	Mata Pelajaran	RPP	Pendekatan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Evaluasi
	Indonesia	jujur, dapat dipercaya, disiplin, tidak mengganggu teman, tanggung jawab	<i>teacher center</i>	diselingi mengerjakan tugas secara individual	tersebut belum sampai pada penilaian
6	Bhs Inggris	Mencantumkan nilai peduli, jujur, tanggung jawab, kerja sama, percaya diri, santun	<i>Student center</i>	Ceramah, tugas individu	Presentasi
7	Agama	Mencantumkan nilai tanggung jawab, kerja keras, mandiri	<i>Student center</i>	Hafalan	Presentasi ke guru
8	Matematika	Mencantumkan nilai kerja sama, tanggung jawab, disiplin, peduli, jujur	<i>Student center</i>	Ceramah, kerja kelompok	Presentasi tugas

Berdasarkan tabel tersebut dapat peneliti nyatakan bahwa semua guru di SMA Negeri 3 Bantul telah mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajarannya, dengan cara mencantumkan nilai-nilai yang akan dikembangkan dan diwujudkan dalam proses pembelajaran di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hal ini penting karena RPP merupakan acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dituliskannya nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam RPP tersebut, mengingatkan para guru untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Selanjutnya akan lebih mencapai sasaran apabila para guru menyampaikan kepada peserta didik pengertian, pentingnya, dan contoh-contoh nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, keberanian, dan keadilan, dapat dinyatakan bahwa para guru di SMA Negeri 3 Bantul, belum mencoba mewujudkan nilai sederhana. Sedangkan nilai adil sudah dicoba diwujudkan oleh satu orang guru, yaitu guru pelajaran PPKn, dengan cara melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang mewakili presentasi, karena saat tersebut semua kelompok ingin mempresentasikan karyanya. Guru mengalami kesulitan untuk melatih peserta didik mewujudkan nilai kesederhanaan dalam proses pembelajaran. Menurut peneliti nilai sederhana dapat dilihat datanya dari cara berpakaian, sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik, sikap peserta didik terhadap kebijakan pemakaian seragam sekolah. Terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai dalam proses pembelajaran tersebut, peneliti belum mendapatkan data bahwa guru secara jelas menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang termuat dalam pendidikan anti korupsi. Terdapat kemungkinan siswa belum mengerti bahwa nilai-nilai tersebut merupakan karakter yang ingin ditanamkan dan dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi, yang bertujuan menanamkan jiwa dan sikap anti korupsi. Dengan demikian peneliti mengusulkan dalam proses pembelajaran berikutnya guru secara jelas menyampaikan bahwa nilai-nilai yang diupayakan terwujud merupakan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, dan apabila peserta didik mewujudkan, berarti peserta didik telah berlatih tidak korupsi.

Apa yang tertulis dalam RPP selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemilihan pendekatan pembelajaran. Agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud, maka guru perlu memilih pendekatan pembelajaran yang mampu mewujudkan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Secara umum guru di SMA Negeri 3 Bantul menggunakan pendekatan pembelajaran siswa aktif (*Student Center*), walaupun masih ditemukan yang pembelajaran lebih terpusat kepada guru (*teacher center*). Guru SMA Negeri 3 Bantul dalam proses pembelajaran telah memosisikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran semata. Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, guru lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Namun demikian dalam salah satu proses pembelajaran mata pelajaran Agama dan mata pelajaran bahasa Indonesia, walaupun pendekatan pembelajaran telah *teacher center*,

namun dalam pelaksanaan masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan tugas yang diberikan kepada peserta didik bersifat individual, sehingga interaksi antar peserta didik, juga interaksi antara peserta didik dengan guru yang memudahkan peserta didik mewujudkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, belum terjadi. Bahkan pada saat seharusnya siswa bertanggungjawab dengan jawabannya, guru secara tidak disadari menuntun jawaban peserta didik, sehingga justru peserta didik menjadi kurang mewujudkan nilai tanggung jawab. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran agama guru berupaya mewujudkan nilai tanggung jawab, dengan jalan setelah menghafal bersama-sama dengan guru, peserta didik harus menghafalkan di hadapan guru secara tatap muka. Cara demikian sebenarnya bagus dari aspek tanggung jawab secara personal, namun demikian terdapat kekurangannya, yaitu bagi peserta didik yang tidak ke hadapan guru cenderung melakukan apapun yang ingin mereka lakukan, yang kurang sesuai dengan aktivitas pembelajaran (mengobrol, main HP, malas-malasan, bahkan ada peserta didik yang meninggalkan kelas), sehingga mereka tidak memperhatikan proses berlangsungnya pembelajaran. Keadaan ini sedikit terdukung dengan tanpa dilakukannya teguran, sapaan, ataupun peringatan dari guru. Dengan demikian upaya menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran perlu didukung pemilihan dan penentuan model pembelajaran, disesuaikan juga dengan jiwa peserta didik / karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, pendekatan, *teacher center* dan *student center* sama-sama membutuhkan manajemen dari seorang guru. Dalam ranah pelaksanaan memungkinkan kedua model pembelajaran ini dilaksanakan secara bergantian dalam satu proses pembelajaran tertentu, dengan memperhatikan situasi siswa dan situasi kelas. *Student center* dengan kondisi siswa yang kurang semangat dalam belajar, menjadi tidak efektif. *Teacher center* dengan kekurangmampuan guru dalam menjelaskan dan mengelola kelas, menjadi tidak efektif pula. Selanjutnya guru SMA Negeri 3 Bantul, perlu lebih lanjut belajar dan berlatih terus memadukan kedua pendekatan pembelajaran tersebut, dengan pertimbangan kondisi siswa dan kemampuan guru.

Dalam bukunya Eko Handoyo (2013: 52-59), dinyatakan bahwa metode pembelajaran nilai-nilai pendidikan anti korupsi adalah diskusi kelas, studi kasus, skenario sistem pengembangan, kuliah umum, diskusi film, laporan investigasi,

eksplorasi tematik, prototipe, pembuktian kebijakan pemerintah, alat-alat pendidikan, pembelajaran keterampilan menulis terpadu, dan pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial. Di antara metode-metode tersebut, yang memungkinkan dilaksanakan oleh guru SMA pada proses pembelajaran adalah diskusi kelas, studi kasus, diskusi film, laporan investigasi, prototipe, pembuktian kebijakan pemerintah, pembelajaran keterampilan menulis terpadu, dan pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial. Berdasarkan data penelitian metode pembelajaran yang digunakan oleh guru SMA Negeri 3 Bantul adalah diskusi kelompok, diskusi kelas, hafalan, dan praktik lapangan. Berdasarkan pada pendapat Eko Handoyo tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa metode guru SMA Negeri 3 Bantul dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran belum variatif dan kreatif. Dengan demikian masih harus dilakukan pelatihan atau workshop pengembangan kreativitas metode pembelajaran untuk para guru.

Pelaksanaan diskusi kelompok dan diskusi kelas diawali dengan pemberian tugas secara berkelompok, baik tugas penyelesain soal, tugas pembuatan makalah, dan tugas penciptaan kreasi gerakan. Diskusi kelompok dan diskusi kelas tentang tugas langsung dikoodinasikan saat proses pembelajaran. Sedang diskusi kelompok dan diskusi kelas tentang kreasi gerakan, makalah, karya tulis ilmiah, dilakukan sejak sebelum pengumpulan atau presentasi ke depan kelas. Berdasarkan observasi peneliti terhadap diskusi kelompok dan diskusi kelas sebagian sudah dilaksanakan secara efektif, dan sebagian lain belum dilaksanakan secara efektif. Menurut peneliti hal tersebut terjadi dikarenakan belum terdapatnya pembagian tugas dalam kelompok tersebut, serta belum ditetapkannya aturan main saat diskusi akan dimulai. Agar diskusi kelas maupun diskusi kelompok berjalan lebih efektif, maka guru harus memfasilitasi pembagian tugas antar anggota kelompok, dan penetapan aturan main saat diskusi

Berdasarkan hasil observasi, evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 3 Bantul adalah dengan pemberian tugas dan presentasi setiap tugas yang diberikan guru. Evaluasi yang berupa *catatan anekdotal*, belum sepenuhnya dilakukan oleh guru. Berdasarkan keterangan dari beberapa responden, bahwa untuk penilaian ini guru mengalami beberapa kesulitan, kesulitan tersebut terletak pada perumusan indikator tercapainya perubahan

sikap/ perubahan pikiran, yang berdampak pada perubahan perilaku. Kesulitan berikutnya terletak pada proses pengamatan yang membutuhkan pencermatan dan waktu tersendiri, terlebih jika kelas merupakan kelas besar. Selain itu guru SMA Negeri 3 Bantul belum secara konsisten melakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian nilai peserta didik, sehingga tindak lanjut yang dilakukan terkadang belum bersifat komprehensif. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mengajukan pemikiran, bahwa untuk pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran diperlukan pendekatan *Lesson study*. Melalui pendekatan *Lesson Study*, beberapa kesulitan yang dihadapi guru dapat terbantu terselesaikan. Misalnya terkait dengan perumusan indikator, perumusan instrumen penilaian, pencatatan terhadap perubahan sikap peserta didik, evaluasi, dan merumuskan rencana tindak lanjut, guru bersama tim *Lesson study* dapat melakukan secara bersama-sama. *Tim Lesson Study* dapat terdiri dari beberapa guru dengan bidang atau mata pelajaran yang berbeda, yang paling penting adalah adanya waktu bersama untuk duduk bersama dan bertindak bersama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran implementasi pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran bahwa semua guru bertugas untuk mengembangkan nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan data penelitian, mata pelajaran Olah Raga di SMA Negeri 3 Bantul merupakan mata pelajaran yang paling banyak mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam proses pembelajarannya. Guru mata pelajaran Olah Raga piawai dalam mengimplentasikan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran Olah Raga ini, nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi diimplementasikan secara hangat, ramah, dan menarik, sehingga siswa mengimplenetasikan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam sikap dan perilakunya saat proses pembelajaran terlihat nyaman dan tidak terbebani. Sedangkan dalam mata pelajaran PPKn, guru mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar dan nilai-nilai yang akan dihabituasikan. Hal ini berkonsekuensi pada pembelajaran yang nyaman, menyenangkan peserta didik, sehingga nilai-nilai pendidikan antikorupsi terimplementasi dalam sikap dan perilaku siswa secara alamiah, bukan dengan tekanan dan paksaan. Sedangkan dalam mata pelajaran Biologi, guru memiliki

ketelatenan dan kesungguhan dalam upaya menghabituisikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran, dengan selalu keliling kelas, mengarahkan, menegur, dan memotivasi siswa dalam bersikap pada saat diskusi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 3 Bantul terintegrasi dalam mata pelajaran.
- b. Guru di SMA Negeri 3 Bantul telah mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajarannya, dengan cara mencantumkan nilai-nilai yang akan dikembangkan dan diwujudkan dalam proses pembelajaran di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
- c. Guru SMA Negeri 3 Bantul mengimplementasikan nilai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, keberanian, dan keadilan, dalam proses pembelajaran. Sedangkan nilai sederhana belum diimplementasikan oleh para guru.
- d. Pendekatan Guru SMA Negeri 3 Bantul dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran adalah pendekatan *student center*.
- e. Metode guru SMA Negeri 3 Bantul dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran belum variatif dan kreatif. Hal ini didasarkan pada hasil observasi bahwa metode pembelajaran yang dilakukan guru masih terbatas pada metode diskusi kelas, diskusi kelompok, praktik lapangan, dan presentasi.
- f. Evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 3 Bantul adalah pemberian tugas untuk mempresentasikan setiap tugas yang diberikan guru. Evaluasi yang berupa catatan anekdot, belum secara sepenuhnya dilakukan oleh guru.
- g. Mata pelajaran Olah Raga merupakan mata pelajaran yang lebih memungkinkan diimplementasikannya nilai-nilai pendidikan antikorupsi secara menarik, kreatif, dan nyaman, selain mata pelajaran PPKn yang secara normatif bertugas untuk mengimplementasikan dan mengembangkan karakter bangsa.
- h. Guru belum menyatakan atau menggarisbawahi bahwa nilai-nilai yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran termasuk nilai-nilai pendidikan antikorupsi, yang bertujuan menanamkan jiwa, semangat anti korupsi.

2. Saran

- a. Guru seharusnya memberikan penjelasan dan penegasan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam proses pembelajaran merupakan nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi
- b. Guru SMA negeri 3 Bantul, perlu lebih lanjut belajar dan berlatih terus memadukan dua pendekatan pembelajaran (*Teacher center* dan *Student Center*) , dengan pertimbangan kondisi siswa dan kemampuan guru.
- c. Guru banyak mengikuti pelatihan atau workshop pengembangan kreativitas metode pembelajaran , agar metode pembelajaran semakin kreatif dan menarik
- d. Dalam diskusi kelompok, guru mengarahkan perlunya pembagian tugas dan penetapan aturan main diskusi
- e. Sekolah perlu melaksanakan dan mengembangkan Lesson Study, untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dialami guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo. 2012. *Pendidikan Karakter, Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Asmani Jamal Makruf. 2012. *Buku panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Diva Press:Yogyakarta
- Doni Koesoema.2010.*Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Grasindo : Jakarta
- _____. 2009. *Pendidikan Karakter di Zaman Keblinger*. Grasindo Jakarta
- Eko Handoyo . 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Ombak : Yogyakarta
- Khan.D.Yahya. 2010. *Pendidikan karakter Berbasis Potensi Diri ; Mendongkrak Kualitas Pendididkan*. Pelangi Publishing : Yogyakarta
- Kementrian Pendidikan Nasional . 2010. *Buku Induk Pembangunan Karakter*. Kementrian Pendidikan Nasional : Jakarta
- _____. 2010. *Desain Induk pendidikan Karakter*. Kementrian Pendidikan Nasioanal : Jakarta

_____, 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan)*. Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan; Jakarta

Novan Ardy Wiyani. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasinya di Sekolah*. Pegagogja : Yogyakarta